

**KONFLIK ANTARA PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA DAN PARTAI DEMOKRAT TENTANG  
KENAIKAN HARGA BBM**

**(Analisis Isi Kuantitatif Objektivitas Pemberitaan Konflik Partai**

**Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tentang Kenaikan**

**Harga BBM pada Harian Republika Periode**

**Maret 2012-Juni 2013)**

**Angela Rianita Puspitaningrum**

**Mario Antonius Birowo**

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Babarsari No. 6 Yogyakarta 55281

rianitaangela@yahoo.co.id

***Abstrak:** Pemberitaan mengenai konflik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sudah ada sejak tahun 2009 jauh sebelum berkembangnya konflik mengenai kenaikan harga BBM. Konflik antara PKS dan Partai Demokrat semakin memanas ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada Maret 2012. PKS menjadi satu-satunya partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan yang menolak kenaikan harga BBM. Konflik semakin memanas ketika dari masing-masing pihak saling beradu melalui spanduk yang dikibarkan di beberapa kawasan tertentu di Jakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori objektivitas Westerstahl untuk meninjau objektivitas Harian Republika dalam memberitakan konflik antara PKS dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 8 sub unit analisis sudah mendekati objektivitas, sedangkan 3 sub unit analisis masih belum memenuhi syarat objektivitas pada Harian Republika.*

***Key word:** analisis isi kuantitatif, objektivitas, konflik, PKS, Partai Demokrat*

## **PENDAHULUAN**

Dalam masa pemerintahan presiden SBY yang kedua (Kabinet Indonesia Bersatu II), isu mengenai kenaikan harga BBM ini mulai muncul pada bulan Maret tahun 2012. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, dari seluruh partai yang tergabung dalam koalisi, beberapa diantaranya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam pemberitaan yang diakses dari [republika.co.id](http://republika.co.id) periode 1 Maret hingga 1 April 2012, pemerintah dan PKS lebih sering muncul. Pemerintah yang dimaksud adalah Presiden SBY dan seluruh kadernya yang tergabung di dalam Partai Demokrat.

Pada masa tersebut, konflik pendapat antara PKS dengan Partai Demokrat sudah mulai muncul dan terus berkembang sampai pada akhirnya pemerintah resmi menaikkan harga BBM pada bulan Juni 2013 lalu. Pada masa tersebut, PKS menjadi satu-satunya partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang menolak kenaikan harga BBM. Pada konflik antara Partai Demokrat dan PKS yang muncul dalam pemberitaan tersebut muncul SBY, Partai Demokrat, dan PKS sebagai pihak-pihak yang sering dipertontonkan dalam pemberitaan. Berita-berita seputar konflik antara PKS dan Partai Demokrat mengenai kenaikan harga BBM ini menarik untuk dikaji karena berita tentang kenaikan harga BBM menjadi hal penting bagi masyarakat. Dari penelitian akan dilihat bagaimana media memposisikan diri dalam pemberitaan.

Penelitian ini menggunakan Harian Republika sebagai medianya dan periode yang digunakan selama bulan Maret 2012 hingga Juni 2013. Pemilihan periode ini dikarenakan pada Maret 2012 konflik ini sudah pernah terjadi. Sampai pada akhirnya terus berkembang hingga bulan Juni 2013. Masa-masa tersebut merupakan masa di mana konflik antara PKS dan Partai Demokrat berada di puncak perselisihan. Masing-masing pihak dari setiap partai saling berselisih pendapat.

Penelitian ini meneliti teks berita pada saat puncak konflik diantara kedua partai terjadi. Pemilihan Harian Republika adalah karena adanya unsur kedekatan antara kasus yang akan diteliti dengan Harian Republika. Berdasarkan hasil survei elektabilitas dari lembaga survei Pol-Tracking Indonesia bulan Maret 2014 lalu,

seiring dengan masa-masa mendekati Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, PKS merupakan salah satu partai politik dengan basis agama Islam terbesar di Indonesia dan menempati posisi kedua dari lima partai politik berbasis Islam yang ada (poltracking.com, 2014).

PKS merupakan salah satu partai politik berbasis agama Islam yang ada di Indonesia. Tidak berbeda dengan Harian Republika yang juga merupakan surat kabar dengan basis agama Islam (Keller, 2009:82-83). Ada unsur kedekatan diantara PKS dan Harian Republika karena keduanya sama-sama memiliki basis agama Islam. Faktor-faktor tersebutlah yang mendasari peneliti dalam mengangkat tema penelitian ini. Peneliti melihat sejauh mana objektivitas pemberitaan yang disodorkan oleh Harian Republika, media yang memiliki basis yang sama yaitu agama Islam, dengan salah satu objek penelitian yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari beberapa penelitian mengenai objektivitas, terlihat suatu kecenderungan media dalam memberitakan suatu peristiwa yang masih relevan jika dikaji dengan menggunakan teori objektivitas. Dalam membedah isi berita dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip objektivitas Westerstahl yang terdiri dari *factualness*, *accuracy*, *relevance*, *balance*, *completeness*, dan *neutrality*.

#### **KERANGKA TEORI**

Menurut Barus (2010:16), pers memiliki beberapa fungsi yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan sarana kontrol sosial. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi fakta peristiwa tersebut pada saat proses pembuatan berita dilakukan. Objektivitas tetap ada, namun ketika sudah masuk ke dalam pikiran, objektivitas tersebut sudah banyak dipengaruhi berbagai macam nilai. Begitu pula dengan objektivitas di media massa yang bersifat subjektif karena telah tercampur dengan konstruksi pikiran dan lembaga media (Nurudin, 2009:80). Denis McQuail dalam bukunya yang berjudul *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest* (1992:196), mengutip skema kemudian menguraikan kerangka objektivitas yang dikemukakan oleh

Westerstahl. Objektivitas terdiri dari dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek evaluatif (McQuail, 1992:197 dan 200). Aspek kognitif berkaitan dengan kualitas informasi dari suatu berita. Sedangkan imparsialitas atau ketidakberpihakan terkait dengan satu atau dua sisi dari sebuah berita (Eriyanto, 2011:194). Aspek evaluatif (imparsialitas) terbagi menjadi dua sub dimensi, yaitu *balance* dan *neutrality*. Dalam konsep ketidakberpihakan, keseimbangan (*balance*) merujuk pada sudut pandang terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu peristiwa.

Menilai netralitas lebih mengarah pada penggunaan kata-kata bermakna konotasi (McQuail, 1992:201). Sub dimensi netralitas terbagi menjadi empat kategori meliputi, *sensationalism*, *stereotype*, *juxtaposition*, dan *linkages* (McQuail, 1992:232-234). Berdasarkan sub dimensi netralitas yang diutarakan oleh McQuail tersebut, hanya kategori sensasionalisme saja yang digunakan oleh peneliti karena kategori tersebut terkait langsung dengan topik dalam penelitian ini. Penyajian secara netral, terkait pada masalah diantaranya penempatan di mana berita tersebut disajikan, pemilihan *headline*, dan pemilihan kata. Objektivitas mensyaratkan informasi yang disampaikan tidak memihak, terorganisir, dan berhati-hati. Dari hal tersebut, segala macam bentuk sensasi seperti penggunaan kata-kata, emosi yang terkandung di dalam berita, dan bentuk penyajian dari sebuah berita merupakan bentuk dari sensasionalisme itu sendiri. Emosi dan dramatisasi yang terkandung di dalam berita merupakan cara untuk menarik perhatian. Dalam media cetak, sensasionalisme tersebut dapat berupa penulisan judul pada *headline* yang menggunakan huruf besar dan ilustrasi fotografi (McQuail, 1992:232-233).

Aspek kognitif terkait dengan kualitas informasi. Kualitas informasi sendiri tidak terpisahkan dari faktualitas yang terbagi menjadi dua sub dimensi penting yaitu *truth* atau kebenaran dan relevansi atau *relevance* (McQuail, 1992:196). Sub dimensi kebenaran terkait dengan sejauh mana berita menyampaikan informasi dengan benar. Wartawan dalam menyampaikan sebuah berita tidak diperbolehkan melakukan pemihakan kepada salah satu pihak yang tengah bertikai. Karena seharusnya sudut pandang baru dari sebuah konflik diberikan oleh wartawan. Jika nampak adanya keberpihakan terhadap salah satu

pihak yang sedang berkonflik maka berita tersebut bukan lagi berita yang objektif. (Nurudin, 2009:83). Relevansi (*relevance*) menunjukkan apakah berita yang disajikan sudah relevan. Relevansi tidak mengutamakan penyajian, namun lebih mengutamakan proses seleksi. Peristiwa layak dikatakan menjadi sebuah berita apabila memenuhi kriteria layak berita. Siregar (1998:27-28) mendeskripsikan kriteria layak berita tersebut meliputi *significance* (penting), *magnitude* (besar), *timeliness* (waktu), *proximity* (kedekatan), *prominence* (tenar), dan *human interest* (manusiawi).

Jurnalisme fokus melaporkan peristiwa yang terjadi secara tepat (Kovach dan Rosenstiel, 2001:106). Wartawan melakukan proses seleksi ini yang memiliki peranan penting dari sebuah berita apakah berita tersebut berkaitan atau tidak. Berkaitan atau tidaknya sebuah berita dapat dipahami sebagai ada atau tidaknya hubungan antara narasumber yang digunakan dalam sebuah berita terhadap peristiwa yang diangkat dalam berita tersebut. Keterkaitan antara judul dengan isi berita juga menjadi indikator relevansi dari sebuah berita. Kemudian *informativeness* merupakan ada atau tidaknya unsur-unsur pendukung untuk melengkapi sebuah berita dengan tujuan semakin mempermudah pembaca dalam memahami isi berita. Unsur-unsur tersebut harus berkaitan dengan peristiwa yang diberitakan, meliputi foto, gambar, gaya penulisan, tabel, dan grafik.

Imparsialitas berkaitan dengan sistematis atau tidaknya suatu berita dalam menampilkan satu sisi atau dua sisi dari peristiwa yang diberitakan (Eriyanto, 2011:194). Imparsialitas menekankan ada atau tidaknya keberpihakan dengan salah satu pihak dalam sebuah peristiwa. Imparsialitas terdiri dari dua aspek penting yaitu *balance* (berimbang) dan *neutrality* (netral) (McQuail, 1992:201-204). Berimbang terkait dengan ditampilkannya semua sisi dari sebuah berita dengan tidak menghilangkan dan memilih sisi tertentu untuk diberitakan. Berita dapat dikatakan berimbang jika memenuhi aspek-aspek proporsional dan dua sisi. Aspek proporsional melihat apakah masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa yang diberitakan sudah memperoleh kesempatan yang sama. Sedangkan aspek dua sisi melihat apakah masing-masing perdebatan dalam sebuah peristiwa sudah disajikan (Eriyanto, 2011:195).

Netral (*neutrality*) melihat apakah suatu peristiwa diberitakan apa adanya dan tidak memihak salah satu pihak. Berita dikatakan netral apabila memenuhi aspek *non evaluatif* dan *non sensasional*. Jurnalis tidak melebihkan fakta dari suatu peristiwa yang akan diberitakan (Eriyanto, 2011:195). Luwi Ishwara dalam buku *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar* (2005:53) menambahkan konflik sebagai nilai berita, yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah berita. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2010:5). Konflik seperti perang atau perkelahian layak menjadi berita karena pada umumnya menimbulkan kerugian dan adanya korban. Begitu pula dengan debat-debat (konflik) dan isu-isu yang menyangkut kehidupan memperoleh tempat penting dalam pemberitaan.

#### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti dituntut untuk bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. Batasan konsep dan alar ukurnya harus melewati pengujian terlebih dahulu untuk memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas (Kriyantono, 2012:57).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. Peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif untuk menganalisis objektivitas pemberitaan konflik antara PKS dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM pada Harian Republika melalui unit analisis dan kategori-kategori yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan datanya berupa pencarian dan pengumpulan berita-berita yang terkait dengan konflik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat pada Harian Republika. Artikel berita yang dicari dan dikumpulkan berfokus pada topik konflik PKS dan Partai Demokrat mengenai kenaikan harga BBM.

Proses pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan menggunakan lembar *coding* atau *coding sheet* sebagai alat pengumpul data. Lembar *coding* sudah berisi kategori-kategori yang akan dikoding. Berikut ini merupakan unit analisis berisi kategori yang sudah ditentukan oleh peneliti:

NO.	DIMENSI	SUB UNIT ANALISIS	KATEGORISASI
1.	Faktualitas	Faktualitas	a. Fakta sosiologis b. Fakta psikologis
		Verifikasi	a. Ada b. Tidak ada
		Percampuran opini dan fakta	a. Ada b. Tidak ada
		Relevansi narasumber dengan berita	a. Relevan b. Tidak relevan
		Nilai berita	a. Mengarah ke <i>significance</i> b. Mengarah ke <i>human interest</i>
		Relevansi judul dengan isi berita	a. Relevan b. Tidak Relevan
		Unsur pendukung	a. Ada b. Tidak ada
		5W+IH	a. Lengkap b. Tidak Lengkap
2.	Imparsialitas	Sensasionalisme	a. Ada b. Tidak ada
		<i>Cover both side</i>	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Multi sisi
		<i>Even handed evaluation</i>	a. Positif b. Negatif c. Netral

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan dua *coder* lainnya. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa penelitian ini dapat dilanjutkan. Uji reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus pengukuran reliabilitas yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti dengan ambang batas toleransi 0,7 atau 70% (Eriyanto, 2011:290).

Untuk menganalisis data, peneliti memilih dua *coder* yang dianggap memiliki kemampuan terhadap topik yang diteliti. Lembar *coding* diisi oleh

peneliti bersama dengan kedua *coder*. Lembar *coding* tersebut terstruktur, sudah memuat kategori yang dikoding. Peneliti dan kedua *coder* membaca teks berita yang menjadi objek penelitian, kemudian mengisi lembar *coding* berdasarkan teks berita yang sudah dibaca. Peneliti dan kedua *coder* akan melakukan pencatatan yang sama berdasarkan batasan yang ada dalam definisi operasional. Semakin tinggi hasil pengkodingan, maka semakin reliabel hasil yang diperoleh.

## **HASIL DAN ANALISIS**

Berikut ini merupakan hasil dan analisis masing-masing sub unit analisis terkait dengan pemberitaan konflik PKS dan Partai Demokrat mengenai isu kenaikan BBM pada Harian Republika:

### **1. *Factualness***

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap 37 artikel berita yang dilihat dari sifat fakta, sebesar 84% berita memuat fakta psikologis. Sedangkan sisanya sebesar 16% berita memuat fakta sosiologis. Terlihat selisih yang cukup jauh antara kedua jenis sifat fakta yang terkandung di dalam berita tersebut. Hanya sedikit saja berita yang benar-benar memuat fakta sosiologis. Harian Republika hanya memaparkan pendapat dari narasumber saja di sebagian besar beritanya. Dengan besarnya persentase berita yang memuat fakta psikologis ini, maka Harian Republika dinyatakan belum objektif pada aspek sifat fakta ini.

### **2. Verifikasi**

Hasil analisis terhadap 37 artikel berita pada Harian Republika menunjukkan bahwa 95% atau 35 artikel berita telah melakukan verifikasi. Sedangkan sisanya sebesar 5% atau 2 artikel berita belum melakukan verifikasi. Sebagian besar verifikasi yang sudah diterapkan oleh Harian Republika sudah baik. Namun, meski masih adanya sebagian kecil berita yang belum memenuhi unsur verifikasi, maka Harian Republika sudah mendekati objektif pada aspek ini.



### 3. Percampuran Opini dan fakta

Berdasarkan hasil analisis terhadap 37 artikel berita, Harian Republika sudah baik dalam memberitakan konflik antara PKS dan Partai Demokrat. Pada 30 artikel berita atau 81% tidak ditemukan adanya percampuran opini di dalam pemberitaan tersebut. Sedangkan sisanya pada 7 artikel berita atau 19% masih ditemukan opini pribadi dari wartawan di dalam berita. Opini yang sifatnya subjektif tidak dikehendaki dalam jurnalisme, karena yang dikehendaki adalah fakta yang objektif (Sumadiria, 2005:6-7). Pada aspek ini Harian Republika sudah mendekati objektif, karena lebih dari 50% berita di dalamnya tidak memuat adanya percampuran antara opini dan fakta.

### 4. Kelengkapan (*Completeness*)

Hasil analisis menunjukkan sebesar 68% atau 25 artikel berita yang dimuat Harian Republika sudah memenuhi unsur kelengkapan. Sisanya, sebanyak 12 berita atau 32% masih belum memenuhi unsur kelengkapan sebuah berita. Kelengkapan merupakan salah satu syarat supaya berita disebut objektif. Lengkapnya unsur 5W+1H yang terkandung di dalam sebuah berita menunjukkan bahwa berita tersebut merupakan berita yang objektif. Meskipun Harian Republika masih memuat berita yang tidak lengkap mengandung unsur 5W+1H, maka Harian Republika dinyatakan sudah mendekati objektif karena lebih dari 50% beritanya sudah memenuhi unsur 5W+1H.

### 5. *Informativeness*

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sebagian besar berita pada Harian Republika, yaitu sebesar 68% atau 25 artikel berita tidak menambahkan data pendukung. Sedangkan sebanyak 12 berita atau 32% sudah mencantumkan data pendukung berupa foto, ilustrasi, dan grafik. Adanya data pendukung sangat membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan pada sebuah berita.

### 6. Relevansi Narasumber dengan Berita

Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir seluruh artikel berita tentang konflik PKS dan Partai Demokrat pada Harian Republika sudah relevan. Narasumber yang dipilih terkait dengan pemberitaan. Relevansi antara

narasumber dengan pemberitaan adalah sebesar 92% atau 34 berita, sedangkan sisanya 8% atau 3 berita tidak memiliki relevansi antara narasumber dengan isi berita. Secara keseluruhan, penyajian berita yang dilakukan Harian Republika sudah baik dengan adanya relevansi antara narasumber dengan konten berita. Pada aspek ini Harian Republika sudah mendekati objektif karena hanya 8% berita saja yang tidak memiliki relevansi antara narasumber dengan isi berita.

#### 7. Nilai Berita

Hasil analisis menunjukkan hampir seluruh berita, yaitu sebesar 97% mengenai konflik PKS dan Partai Demokrat mengarah ke *significance*. Sedangkan 1 berita atau 3% saja yang mengarah ke *human interest*. Maka, dapat disimpulkan bahwa Harian Republika hampir mendekati objektif pada aspek ini dalam memberitakan konflik PKS dan Partai Demokrat.

#### 8. Relevansi Judul dengan Isi Berita

Hasil analisis menunjukkan sebanyak 35 berita atau 95% menunjukkan adanya kesesuaian antara judul dengan isi beritanya. Sedangkan hanya sedikit saja berita, yaitu 2 berita atau 5%, yang tidak memiliki kesesuaian antara judul dengan isi berita yang disajikan. Maka, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Harian Republika sudah mendekati objektif pada aspek ini meskipun masih terdapat 5% berita yang tidak memiliki kesesuaian antara judul dengan isinya. Itu dikarenakan lebih dari 50% beritanya sudah memenuhi syarat objektivitas.

#### 9. Sensasionalisme

Hasil analisis terhadap 37 artikel berita mengenai konflik PKS dan Partai Demokrat menunjukkan bahwa 29 atau 78% berita dinyatakan tidak memuat unsur sensasionalisme. Sedangkan sisanya, sebesar 8 atau 22% berita terdapat unsur sensasionalisme. Sensasionalisme ditunjukkan dengan penggunaan judul dengan ukuran yang besar, dan terkadang dilengkapi dengan ilustrasi yang menimbulkan efek dramatisasi. Ada pula beberapa penggunaan kata bermakna konotatif di dalam berita.

#### 10. *Cover Both Side*

Berdasarkan hasil analisis terhadap 37 artikel berita mengenai konflik PKS dan Partai Demokrat pada Harian Republika, terlihat bahwa sebesar 64% atau 18 berita ditulis dari satu sisi saja. Selanjutnya, berita yang menyajikan dua sisi sebesar 25% atau 10 berita. Sedangkan sisanya, sebesar 11% atau 9 berita disajikan dari berbagai macam sudut pandang. Pemberitaan secara satu sisi yang hanya menampilkan pihak PKS lebih mendominasi. Penggunaan narasumber dari pihak di luar PKS dan Partai Demokrat merupakan usaha Harian Republika dalam menyikapi pemberitaan konflik kedua partai politik tersebut secara netral. Jika narasumber terkait yang ditampilkan semakin beragam, maka berita tersebut akan menjadi lebih objektif.

#### 11. *Even Handed Evaluation*

Sub unit analisis ini melihat bagaimana penilaian terhadap berita tersebut. Penilaian terbagi menjadi tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Sebesar 16% atau 6 berita diberitakan secara positif, sedangkan 14% atau 5 berita diberitakan dengan nada negatif. Sisanya, yaitu sebesar 70% atau 26 berita diberitakan secara netral. Pemberitaan secara netral terhadap PKS ini tersebar secara merata selama rentang waktu Maret 2012 hingga Juni 2013. Sedangkan pemberitaan terhadap Partai Demokrat mengarah pada penilaian negatif.

### Analisis Konflik

#### 1. Akar / Sumber Konflik

Konflik PKS dan Partai Demokrat sudah terjadi sejak beberapa waktu silam. Berawal pada Mei 2009, PKS menolak Boediono sebagai calon Wakil Presiden dan sempat mengancam akan mengalihkan dukungannya pada pasangan lain. Kemudian, pada November 2009, PKS ikut mendukung penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pemberian fasilitas pendapatan jangka pendek Bank Century yang dinyatakan sebagai bank gagal. Menurut PKS, hal ini dinilai dapat memperbaiki sistem dan dapat menyelidiki

lebih dalam kasus Bank Century. Sedangkan Partai Demokrat, yang merupakan partai politik pengusung SBY sebagai presiden dalam pemerintahan, menolak dilakukannya penggunaan hak angket dengan alasan dapat terjadi tumpang tindih dengan proses hukum.

Februari 2011, PKS mendukung penggunaan hak angket mafia pajak yang akhirnya kandas dalam rapat paripurna DPR. Presiden akhirnya membuat kontrak koalisi baru dan sempat tak mengundang PKS untuk mendiskusikan kontrak itu. Partai Demokrat menilai hak angket mafia pajak bukan untuk mengawasi, justru menghentikan proses pemeriksaan kasus-kasus mafia pajak seperti Gayus Tambunan. Maret 2012, PKS menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM dengan alasan bahwa harga BBM akan memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. PKS mengklaim penolakan kenaikan harga BBM karena berpihak pada rakyat, menjamin keamanan negara, dan menyehatkan anggaran keuangan. PKS juga menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM memberatkan rakyat kecil hingga menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah.

Sampai pada akhirnya, Juni 2013, PKS kembali menjadi satu-satunya partai koalisi penolak kebijakan kenaikan harga BBM. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran diberbagai wilayah di Indonesia. Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Medan rusuh hingga menyebabkan banyak demonstran mengalami luka-luka. Kerusuhan demonstrasi tersebut terjadi antara mahasiswa anggota Serikat Kerakyatan Indonesia dengan aparat kepolisian.

## 2. Pemangku Kepentingan

- a. Pihak pertama, adalah mereka yang secara langsung saling menentang atau berkelahi sekaligus berkepentingan dalam konflik (Anto dkk, 2007:52). Pihak pertama dalam konflik PKS dan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM ini adalah Partai Demokrat dan PKS. Kedua belah pihak

tersebut terlibat secara langsung di dalam konflik meskipun tidak terlibat secara fisik.

- b. Pihak kedua, adalah mereka yang merupakan sekutu dari pihak pertama, tidak terlibat secara langsung dalam konflik, yang dapat berubah menjadi pihak pertama ketika konflik memanas (Anto dkk, 2007:52-53). Dalam kasus ini, partai politik anggota koalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) yang terpecah menjadi dua kubu adalah mereka yang menjadi pihak kedua. Dua kubu dalam KIB II yang pro terhadap pemerintah adalah PAN, PPP dan PKB. Sedangkan kubu yang kontra adalah PKS, Golkar, Gerindra, dan Hanura. Pada akhirnya PKS menjadi partai tunggal yang menolak kenaikan harga BBM karena tiga partai lain yang sebelumnya menyatakan sikap kontra berubah menjadi pro.
- c. Pihak ketiga, adalah mereka yang berkepentingan dengan penangan konflik (Anto dkk, 2007:53). Konflik antara PKS dan Partai Demokrat ini berusaha dimediasi oleh DPR melalui rapat paripurnanya. Rapat paripurna yang dilaksanakan setiap kali terjadi konflik antara dua partai ini bertujuan untuk memperjelas kasus dan pengambilan keputusan terhadap kasus.

### 3. Dinamika Konflik

Setiap konflik yang terjadi antara Partai Demokrat dan PKS selalu mengalami masa reda dan kemudian konflik itu muncul lagi. Hingga berakhirnya masa jabatan Presiden SBY periode dua bulan Oktober tahun 2014 ini, tidak pernah terjadi kesepakatan diantara kedua pihak tersebut dalam menyelesaikan konflik. Setelah peristiwa penolakan dan kecaman keras PKS terhadap Partai Demokrat pada Juni 2013 lalu sampai pada saat ini, konflik dibiarkan meredup begitu saja tanpa adanya usaha dan kesepakatan apapun untuk menyelesaikan konflik yang sering terjadi antara dua partai tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Harian Republika belum objektif secara keseluruhan dalam memberitakan konflik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrat tentang kenaikan harga BBM. Dari 11 sub unit analisis, ada 8 sub unit analisis yang persentasenya mendekati objektif pada Harian Republika.

Delapan unit analisis yang mendekati objektif meliputi verifikasi, percampuran opini dan fakta, keterkaitan narasumber dengan isi berita, relevansi nilai berita, kesesuaian judul dengan isi berita, kelengkapan 5W+1H, sensasionalisme, dan *even handed evaluation* dengan hasil persentase melebihi 50% di setiap sub unit analisisnya. Ada 3 sub unit analisis yang masih jauh mendekati objektivitas yaitu pada kategori bahan baku berita, unsur pelengkap, dan keseimbangan dalam menyajikan berita (*cover both side*) dengan persentase yang kurang dari 50% di setiap sub unit analisisnya.

### **Saran**

Penelitian dengan meninjau dari objektivitasnya sudah sangat banyak, sehingga tidak terdapat lagi sesuatu terbaru yang dapat dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini tetap dilakukan karena peneliti tertarik dengan kesamaan basis yang melatarbelakangi media dan objek penelitian. Akan lebih baik jika pada penelitian-penelitian selanjutnya ditinjau dari sisi penerapan jurnalisme damai yang pada akhirnya mampu melihat penyelesaian dari kasus konflik seperti ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anto, J. 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ishwara, Luwi. 2005. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kovach dan Rosenstiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau

- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publications Ltd.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- Sumadiria, AS. Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika

#### **Internet**

<http://www.poltracking.com/produk/riset-dan-survei/738-prediksi-elektabilitas-partai-pada-pemilu-2014-dan-tone-pemberitaan-15-media-mainstream-pada-masa-kampanye> diakses pada Rabu 7 Mei 2014 pukul 13.19 WIB

#### **Lain-Lain**

(pdf) Keller, Annet. 2009. *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika* (<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/09806.pdf>). Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (diakses pada Senin, 22 September 2014 pukul 13.02 WIB)